



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 8 No. 1 Tahun 2026

Optimalisasi Peran LLDIKTI Wilayah VI sebagai Fasilitator dalam Tata Kelola Beasiswa KIP Kuliah di Jawa Tengah

Penulis

Zaenal Arifin¹, Wasino², Suchatiningsih Dian Wisika Prajanti³, Sungkowo Edy Mulyono⁴

1 Program Studi Manajemen Kependidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

4 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Optimalisasi Peran LLDIKTI Wilayah VI sebagai Fasilitator dalam Tata Kelola Beasiswa KIP Kuliah di Jawa Tengah

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Efektivitas program Beasiswa KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Tengah sangat bergantung pada kualitas fasilitasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI, namun peran fasilitator saat ini masih didominasi fungsi administratif-verifikatif.
- 2) Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola beasiswa di PTS menjadi hambatan utama dengan tingginya tingkat rotasi staf (83% PTS sampel mengalami pergantian personel dalam dua tahun terakhir) yang menyebabkan hilangnya pengetahuan institusional.
- 3) Kesenjangan persepsi antara mahasiswa penerima dan pengelola PTS mengindikasikan perlunya transformasi peran LLDIKTI dari administrative gatekeeper menjadi capacity builder yang berfokus pada pembinaan substantif dan penguatan kelembagaan

Ringkasan

Policy brief ini menyoroti peran LLDIKTI Wilayah VI dalam memfasilitasi tata kelola Beasiswa KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Tengah. Kajian ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang berjalan saat ini masih lebih berfokus pada verifikasi administratif melalui sistem SIBRAJA, sementara pembinaan substantif bagi pengelola PTS masih terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman regulasi, tingginya rotasi pengelola beasiswa di tingkat PTS, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi. Temuan juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan PTS berhubungan dengan kualitas layanan yang dirasakan mahasiswa, terutama dalam proses pencairan beasiswa. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, diikuti dengan perbaikan pembinaan, integrasi sistem informasi, penataan lini masa pelaksanaan, serta penyempurnaan petunjuk teknis. Mengingat cakupan kajian masih terbatas, temuan ini perlu dipahami sebagai indikasi awal untuk mendukung perbaikan kebijakan lebih lanjut, termasuk melalui pelibatan pengelola program di tingkat pusat.

Kata kunci: fasilitasi kelembagaan, kebijakan pendidikan, KIP Kuliah, pendidikan tinggi, tata kelola beasiswa

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 13 triliun untuk Program Beasiswa KIP Kuliah tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar yang menjangkau lebih dari 938.000 mahasiswa secara nasional. Di Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI mengemban tanggung jawab memfasilitasi penyaluran beasiswa kepada lebih dari 25.000 mahasiswa *on-going* di 181 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Besarnya skala program ini menempatkan KIP Kuliah sebagai kebijakan dengan signifikansi strategis yang tinggi: setiap inefisiensi tata kelola tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi secara langsung mengancam aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera, efektivitas belanja negara, dan akuntabilitas program secara keseluruhan (Hill dan Hupe 2014; Pressman dan Wildavsky 1984). Sebagai unit pelaksana teknis Kemdiktisaintek, LLDIKTI menjalankan fungsi strategis dalam pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi, termasuk pengawasan program beasiswa nasional (UU No. 12 Tahun 2012; Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021; Kepsesjen No. 7/A/KEP/2025).

Data kinerja LLDIKTI Wilayah VI mengindikasikan adanya tantangan tata kelola yang mendasar. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 tentang partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran lintas program studi baru mencapai 5,13% dari target 6,22%, sementara indeks kepuasan layanan publik tercatat 87,55%—di bawah target nasional 88,50% (LLDIKTI Wilayah VI, 2024). Lebih mengkhawatirkan, data validasi dokumen menunjukkan bahwa 74 dari 181 PTS (40,9%) mengalami penolakan dokumen pada tahun 2025, dengan rata-rata 1–5 dokumen bermasalah per institusi. Jenis kesalahan yang paling umum meliputi ketidaklengkapan data mahasiswa, ketidaksesuaian format pelaporan dengan sistem SIBRAJA, serta kesalahan input data

penerima beasiswa. Penolakan dokumen ini berdampak langsung pada keterlambatan verifikasi dan pencairan dana, yang pada gilirannya membebani mahasiswa penerima manfaat dan meningkatkan beban kerja pengelola di PTS. Pola berulang dari penolakan serupa mengindikasikan hambatan sistemik yang berakar pada defisit kapasitas institusional, bukan semata kelalaian individual (Grindle 1997).

Kajian terdahulu umumnya berfokus pada karakteristik penerima beasiswa atau aspek administratif internal PTS, namun belum ada evaluasi sistematis terhadap peran LLDIKTI selaku fasilitator kebijakan dalam ekosistem tata kelola KIP Kuliah. Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana kualitas fasilitasi LLDIKTI Wilayah VI memengaruhi efektivitas pengelolaan beasiswa dan capaian akademik mahasiswa penerima? Mekanisme pembinaan dan pengawasan seperti apa yang perlu dirancang untuk menjawab tantangan tersebut? Studi ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengevaluasi efektivitas peran LLDIKTI sebagai fasilitator serta mengidentifikasi strategi prioritas guna meningkatkan kualitas tata kelola Beasiswa KIP Kuliah di PTS Jawa Tengah.

Pendekatan dan Batasan Kajian

Policy brief ini disusun berdasarkan kajian evaluatif terhadap peran LLDIKTI Wilayah VI dalam tata kelola Beasiswa KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Tengah. Analisis memadukan penelaahan aspek konteks kebijakan, kapasitas kelembagaan, proses pembinaan dan pengawasan, serta dampaknya terhadap penerima manfaat. Untuk memperkuat penentuan arah rekomendasi, kajian ini juga mempertimbangkan penilaian prioritas strategi dari para pemangku kepentingan. Sumber data berasal dari wawancara dengan pengelola beasiswa pada 6 PTS yang dipilih secara purposif untuk mewakili variasi wilayah, ukuran institusi, dan akreditasi, serta survei terhadap 486 mahasiswa penerima KIP Kuliah aktif dari keenam PTS tersebut.

Keterbatasan penelitian perlu dicatat secara transparan. Cakupan sampel PTS yang hanya 6 dari 181 (3,3%) menjadikan temuan ini bersifat eksploratoris-indikatif dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik untuk keseluruhan populasi PTS di Jawa Tengah. Di samping itu, perspektif pengelola di tingkat LLDIKTI Wilayah VI dan PPAPT Kemdiktisaintek selaku pengelola program di tingkat pusat belum diperoleh secara proporsional dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan-temuan yang disajikan berikut ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi awal masalah kebijakan (*exploratory findings*) yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian dengan cakupan sampel yang lebih representatif dan inklusif terhadap seluruh aktor kunci dalam ekosistem tata kelola KIP Kuliah.

Pembahasan

Kesenjangan Peran: Dari Fasilitator Substantif Menjadi Verifikator Administratif

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peran LLDIKTI dalam praktiknya lebih dominan pada fungsi administratif-verifikatif, terutama melalui sistem pelaporan SIBRAJA. Seluruh informan dari keenam PTS sampel menyatakan bahwa interaksi dengan LLDIKTI lebih banyak berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kepatuhan format, sementara pembinaan substantif—seperti pendampingan peningkatan kapasitas pengelola, pengembangan sistem pemantauan luaran mahasiswa, atau konsultasi strategis—relatif sangat terbatas. Pola ini tampak konsisten di seluruh variasi ukuran dan akreditasi PTS dalam sampel, meski perlu dikonfirmasi pada cakupan yang lebih representatif (Sariri dan Prabawati 2024).

Ketimpangan peran ini mencerminkan ketidakseimbangan pelaksanaan fungsi manajemen klasik: fungsi controlling (pengawasan melalui verifikasi) sangat dominan, sementara fungsi leading (pembinaan dan pengembangan SDM) belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pembinaan cenderung bersifat reaktif-korektif, bukan proaktif-preventif. Dalam kerangka

implementasi kebijakan, kondisi ini menempatkan LLDIKTI lebih sebagai administrative gatekeeper yang mengutamakan kepatuhan prosedural, dibandingkan sebagai capacity builder yang secara sistematis memperkuat kapasitas institusional PTS (Grindle 1997; Hill dan Hupe 2014). Model tata kelola yang berlaku cenderung bersifat compliance-oriented ketimbang development-oriented, sehingga akar permasalahan struktural di PTS tidak tertangani secara memadai (Rhodes 1997).

Kapasitas SDM sebagai Hambatan Utama

Kesenjangan peran tersebut memiliki akar yang dapat ditelusuri pada kondisi kapasitas SDM pengelola beasiswa di tingkat PTS. Lima dari enam PTS sampel (83%) mengalami pergantian staf pengelola beasiswa dalam dua tahun terakhir, dengan dua institusi mengalami pergantian berulang lebih dari sekali. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa rotasi staf yang tinggi menyebabkan hilangnya pengetahuan institusional (*institutional memory*) dan meningkatkan ketergantungan pada siklus pelatihan berulang setiap kali terjadi pergantian personel (Walsh dan Ungson 1991). Kondisi ini secara langsung melemahkan kesinambungan tata kelola dan meningkatkan risiko kesalahan prosedural yang berulang.

Peningkatan kapasitas SDM merupakan prioritas strategis tertinggi, bahkan lebih utama dibandingkan pembenahan sistem teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan argumen Grindle (1997) bahwa efektivitas program pemerintah lebih ditentukan oleh kapasitas manusia yang mengelolanya daripada oleh kelengkapan sistem teknologi pendukung. Dengan kata lain, investasi pada pengembangan SDM pengelola beasiswa jauh lebih krusial dibandingkan investasi pada perangkat teknologi semata (Faradisa *et al.* 2023).

Kesenjangan Persepsi dan Dampaknya pada Kualitas Layanan

Survei terhadap 486 mahasiswa penerima beasiswa dari enam PTS sampel menunjukkan

adanya perbedaan penilaian yang cukup jelas antar aspek layanan. Manfaat program dinilai sangat baik, yang mencerminkan tingginya apresiasi mahasiswa terhadap dukungan finansial yang diterima. Namun, pada saat yang sama, aspek proses administratif—terutama pencairan beasiswa—masih dinilai paling lemah. Secara khusus, hanya 64,2% mahasiswa menyatakan bahwa pencairan dana berlangsung tepat waktu setiap semester, dan 72,4% menilai informasi mengenai kriteria seleksi telah disampaikan secara jelas dan mudah diakses. Mengingat data ini berasal dari 6 PTS sampel, temuan-temuan ini perlu diinterpretasikan sebagai indikasi awal pola persepsi, bukan representasi statistik seluruh 181 PTS di Jawa Tengah (Sariri dan Prabawati 2024).

Lebih signifikan secara kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan beasiswa berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan PTS, termasuk stabilitas SDM, integrasi sistem informasi, dan kelengkapan dokumentasi prosedur. Di PTS dengan kapasitas kelembagaan rendah, hanya 48% mahasiswa menyatakan pencairan dana dilakukan tepat waktu, sedangkan pada PTS dengan kapasitas lebih baik angkanya mencapai 72%. Temuan ini secara empiris membuktikan bahwa persoalan tata kelola KIP Kuliah tidak semata bersumber dari ketidaksempurnaan regulasi, melainkan terutama dari defisit kapasitas institusional yang mendasar (Stufflebeam dan Coryn 2014; Yusuf 2015). Dalam perspektif pengembangan kapasitas, hal ini mengisyaratkan bahwa intervensi LLDIKTI semestinya diarahkan pada penguatan kapasitas PTS secara terprogram dan berkelanjutan. Model tata kelola yang optimal adalah model kolaboratif-fasilitatif: LLDIKTI berperan sebagai mitra strategis pembangun kapasitas, sementara PTS secara bertahap mengembangkan kemandirian pengelolaan yang akuntabel (Grindle 1997; Rhodes 1997).

Rekomendasi

Bagi LLDIKTI Wilayah VI:

1. Merancang dan mengimplementasikan program pengembangan kapasitas SDM yang

berkelanjutan, mencakup pelatihan teknis terstruktur berbasis kompetensi, sistem manajemen pengetahuan institusional (knowledge management system) untuk mengantisipasi dampak rotasi personel, serta pendampingan berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap institusi (Grindle, 1997; Walsh & Ungson, 1991).

2. Mengembangkan modul pembinaan substantif yang berorientasi pada pendampingan mahasiswa secara holistik—mencakup pencegahan putus studi dan peningkatan prestasi akademik—serta penguatan tata kelola internal PTS, sehingga peran LLDIKTI tidak tereduksi hanya pada verifikasi dokumen administratif (Hill dan Hupe 2014; Stufflebeam dan Coryn 2014).
3. Mendorong integrasi sistem SIBRAJA dengan PDDIKTI dan sistem informasi internal PTS melalui pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang terstandardisasi, guna mengeliminasi duplikasi data, meminimalkan potensi kesalahan input, dan memungkinkan pemantauan luaran mahasiswa secara real-time dan berbasis data (Faradisa *et al.* 2023).

Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta:

1. Menetapkan struktur pengelola beasiswa yang lebih stabil dengan meminimalkan frekuensi rotasi personel, menciptakan posisi khusus dengan jalur karier yang jelas, serta membangun basis pengetahuan institusional yang terdokumentasi dengan baik sehingga kesinambungan tata kelola tidak bergantung pada individu tertentu (Walsh & Ungson, 1991).
2. Mendokumentasikan seluruh prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan beasiswa secara sistematis dan mutakhir, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengetahuan individu tertentu dan memudahkan transfer pengetahuan yang efektif saat terjadi pergantian staf (Yusuf, 2015).

Bagi Kemdiktisaintek:

1. Mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi LLDIKTI untuk menjalankan fungsi fasilitasi substantif secara efektif, tidak hanya fungsi administratif, melalui penambahan tenaga

pendamping yang terlatih dan penganggaran program pengembangan kapasitas yang proporsional dengan skala program KIP Kuliah di wilayahnya (Grindle 1997; Pressman dan Wildavsky 1984).

2. Menyusun kebijakan yang memberikan ruang adaptasi regional yang memadai dan mengurangi frekuensi perubahan prosedur secara mendadak, guna menciptakan stabilitas operasional di tingkat pelaksana dan memungkinkan akumulasi kapasitas institusional yang berkelanjutan (Rhodes 1997; Hill dan Hupe 2014).

Kesimpulan

Studi eksploratoris ini mengidentifikasi indikasi awal yang kuat bahwa pendekatan fasilitasi LLDIKTI Wilayah VI yang terlalu berfokus pada verifikasi administratif belum memadai untuk menjamin efektivitas jangka panjang Program KIP Kuliah. Ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan (controlling) dan fungsi pembinaan (leading) menciptakan siklus koreksi berulang yang tidak menyentuh akar persoalan (Hill dan Hupe 2014). Kegagalan mengatasi akar masalah—yaitu keterbatasan kapasitas SDM dan lemahnya pembinaan substantif—menyebabkan ketergantungan permanen pada verifikasi eksternal dan menghambat pencapaian luaran program yang optimal (Grindle 1997; Walsh dan Ungson 1991). Transformasi peran LLDIKTI dari administrative gatekeeper menjadi capacity builder merupakan arah kebijakan yang secara kuat diindikasikan oleh temuan penelitian ini (Rhodes 1997). Namun demikian, mengingat cakupan sampel yang terbatas (6 dari 181 PTS, atau 3,3%) dan belum tercakupnya perspektif kelembagaan LLDIKTI Wilayah VI maupun PPAPT Kemdiktisaintek selaku pengelola program di tingkat pusat, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai titik tolak untuk penelitian lanjutan yang lebih representatif. Validasi melalui studi dengan sampel PTS yang lebih luas dan pelibatan perspektif PPAPT secara proporsional akan memperkuat basis empiris rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sekaligus memastikan bahwa transformasi peran LLDIKTI benar-benar berdampak nyata pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi

bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Reorientasi peran LLDIKTI ini tidak membutuhkan perubahan struktural yang besar, melainkan pergeseran prioritas dan alokasi sumber daya yang terarah — sebuah langkah yang dapat dimulai dalam siklus anggaran terdekat.

Daftar Pustaka

- Faradisa R, Assidiqi MH, Badriah T. 2023. Evaluasi faktor-faktor pembelajaran online pada perguruan tinggi menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP): Studi kasus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 10(4): 769–780. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2023106860>
- Grindle MS. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*. Massachusetts (MA): Harvard Kennedy School.
- Hill M, Hupe P. 2014. *Implementing Public Policy: An Introduction to The Study of Operational Governance*. Ed ke-3. London: SAGE.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. 2025.
- [LLDIKTI Wilayah VI] Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV. 2024. Laporan kinerja LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024. Jakarta: LLDIKTI Wilayah VI.
- [Permendikbud] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. 2020.
- [Permendikbud] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. 2021.
- Pressman JL, Wildavsky AB. 1984. *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Ed ke-3. California (CA): University of California Press.
- Rhodes RAW. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and*

Accountability. Berkshire: Open University Press.

Sariri F, Prabawati I. 2024. Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*. 12(1): 238–251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>

Stufflebeam DL, Coryn CLS. 2014. *Evaluation theory, models, and applications*. Ed ke-2. California (CA): Jossey-Bass.

[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012.

Walsh JP, Ungson GR. 1991. Organizational memory. *Academy of Management Review*. 16(1): 57–91. <https://doi.org/10.2307/258607>

Yusuf M. 2015. *Asesmen dan evaluasi pendidikan: Pilar penyedia informasi dan kegiatan pengendalian mutu pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Zaenal Arifin, merupakan kandidat doktor pada Program Studi Manajemen Kependidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Penelitiannya berfokus pada evaluasi kebijakan pendidikan tinggi, tata kelola beasiswa, dan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu pendidikan. Beliau memiliki pengalaman sebagai pengelola program beasiswa di LLDIKTI Wilayah VI selama 3 tahun.

(Corresponding Author)

Email: arifin.laneaz@gmail.com



Wasino, adalah Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang serta mengemban amanah sebagai Wakil Direktur di Sekolah Pascasarjana UNNES. Beliau memiliki kepakaran utama di bidang sejarah sosial dan ekonomi, dengan fokus riset mendalam pada sejarah bisnis, perkebunan, hingga transformasi institusi ekonomi di masa kolonial. Selain aktif mengajar di berbagai jenjang studi, beliau juga merupakan peneliti produktif yang mengkaji isu-isu multikulturalisme, pendidikan perdamaian, serta sejarah lokal di Indonesia. Aktivitas akademiknya juga mencakup pengelolaan jurnal ilmiah dan pengembangan inovasi dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.



Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, adalah Guru Besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UNNES dengan kepakaran utama di bidang Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. Fokus risetnya mencakup analisis sosial-ekonomi pertanian, ketahanan pangan, hingga inovasi pemanfaatan limbah lingkungan menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pengolahan eceng gondok menjadi bahan bakar biomassa atau batak.



Sungkowo Edy Mulyono, adalah pakar di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat Perkotaan. Fokus kajiannya meliputi pengembangan solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas urban melalui pendekatan ekonomi-sosial serta sosiologi pembangunan pendidikan. Beliau dikenal aktif dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat di lingkungan perkotaan.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680